

PEMBERIAN GIZI TAMBAHAN NARAPIDANA PEREMPUAN DITINJAU DARI BANGKOK RULES

Erik Mardiansyah

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Muhammad Zidane Kurniawan

Politeknik Pengayoman Indonesia

Thavarel Azuri Pratama

Politeknik Pengayoman Indonesia

Alif Adh Winandha

Politeknik Pengayoman Indonesia

Journal of Correctional Studies
2025, Vol. 02 (02) 35-47
Politeknik Ilmu
Pemasyarakatan

Review
07-08-2025

Accepted
11-08-2025

Abstract

The increase in the number of female prisoners worldwide has created an urgent need to evaluate and improve their welfare conditions in the prison system. One important aspect that is often overlooked is the provision of supplementary nutrition for female prisoners, which has a significant impact on their physical and mental health. This article aims to investigate practices and policies regarding the provision of supplementary nutrition worldwide, particularly in the context of the Bangkok Rules established by the United Nations to provide guidelines for the treatment of female prisoners. The Bangkok Rules, which are international guidelines governing the rights of female prisoners, emphasize the importance of providing adequate nutrition. This article will explain the human rights violations that may occur when nutrition is inadequate according to the Bangkok Rules. Budget constraints, prison infrastructure, and legal obstacles are the main barriers that need to be overcome.

Keywords :

Bangkok Rules, Nutrition, Prisoners

Abstrak

Peningkatan jumlah narapidana perempuan di seluruh dunia telah memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan meningkatkan kondisi kesejahteraan mereka di dalam sistem penjara. Salah satu aspek penting yang seringkali terabaikan adalah pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan, yang memiliki dampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental mereka. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki praktik dan kebijakan pemberian gizi tambahan di seluruh dunia, khususnya dalam konteks peraturan Bangkok Rules yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan pedoman bagi perlakuan terhadap narapidana perempuan. Bangkok Rules, yang merupakan panduan internasional yang mengatur hak-hak narapidana perempuan, mencatat pentingnya memberikan asupan gizi yang memadai. Artikel ini akan menjelaskan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi ketika

pemberian gizi tidak mencukupi sesuai dengan Bangkok Rules. Keterbatasan anggaran, infrastruktur penjara, dan kendala hukum menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.

Kata Kunci :

Bangkok Rules, Gizi, Narapidana

Pendahuluan

Bangkok Rules atau Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengenai Perlakuan Narapidana Perempuan, adalah sebuah panduan penting yang mengatur perlakuan narapidana perempuan dan telah menjadi patokan internasional dalam konteks penegakan hukum dan keadilan yang berlaku bagi narapidana perempuan. Bangkok Rules menggarisbawahi prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlakuan yang manusiawi, dan perlindungan terhadap perempuan yang terjerat dalam sistem peradilan pidana. Salah satu aspek yang menonjol dari Bangkok Rules adalah perhatiannya terhadap kesejahteraan dan kesehatan narapidana perempuan. Kesehatan narapidana, termasuk aspek gizi, adalah elemen penting dalam pemahaman Bangkok Rules, karena berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia, kesejahteraan, dan pemulihan narapidana perempuan yang dihukum. Artikel ini akan mengeksplorasi hubungan yang dalam dan penting antara Bangkok Rules dan kesehatan narapidana perempuan, khususnya dalam konteks pemberian gizi tambahan. Bangkok Rules menegaskan bahwa narapidana perempuan harus diperlakukan dengan hormat dan manusiawi. Ini mencakup hak mereka untuk mendapatkan asupan gizi yang memadai. Dalam banyak sistem penjara, narapidana, terutama narapidana perempuan, mungkin menghadapi tantangan serius terkait gizi. Kondisi penjara yang terbatas, anggaran yang terbatas, dan peraturan yang ketat dapat

menyulitkan penyediaan makanan yang mencukupi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental narapidana perempuan. Kesehatan narapidana perempuan memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Penyediaan gizi yang memadai adalah salah satu elemen yang diperlukan untuk memastikan pemulihan dan resosialisasi yang berhasil. Narapidana perempuan yang menerima asupan gizi yang mencukupi memiliki peluang lebih baik untuk menjalani hukuman mereka dengan produktif, menghindari komplikasi kesehatan serius, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan mereka. Oleh karena itu, Bangkok Rules sejalan dengan tujuan rehabilitasi narapidana perempuan dan mengurangi tingkat kriminalitas berulang, yang pada gilirannya memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan (Meileni *et al.*, 2023).

Sebagaimana diatur dalam Bangkok Rules, pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan bukanlah sekadar tindakan kebaikan hati, melainkan merupakan tanggung jawab yang mendasar bagi pihak berwenang penjara dan sistem peradilan pidana. Ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi bagi narapidana perempuan. Artikel ini akan menggali terkait prinsip-prinsip Bangkok Rules yang terkait dengan gizi memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan narapidana perempuan, menjelaskan tantangan yang ada, dan

mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Dapat dipahami betapa esensialnya Bangkok Rules dalam menjaga kesehatan narapidana perempuan dan mengarahkan upaya pemulihan yang efektif dalam sistem penjara (Meileni *et al.*, 2023).

Lembaga pasyarakatan, sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi manusia para narapidana yang mendekam di dalamnya. Dalam konteks ini, pemenuhan gizi bagi narapidana, khususnya narapidana perempuan, merupakan sebuah permasalahan yang telah lama menjadi sorotan. Artikel ini mengeksplorasi isu krusial terkait pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan, dengan penekanan pada perspektif Bangkok Rules yang merumuskan standar internasional dalam hal perlakuan terhadap narapidana perempuan. Masalah ini tidak dapat diabaikan, mengingat dampak yang signifikan dari asupan gizi yang tidak memadai pada kesehatan dan kesejahteraan para narapidana perempuan. Ironisnya, banyak narapidana perempuan menghadapi risiko gizi buruk dan defisit gizi yang serius saat berada di belakang jeruji besi. Mereka mungkin menderita kurangnya asupan vitamin, mineral, dan nutrisi esensial lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik. Ketidakcukupan gizi ini tidak hanya dapat mengarah pada masalah kesehatan jangka pendek seperti berkurangnya daya tahan tubuh, gangguan pencernaan, atau masalah kulit, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kesehatan kronis yang mungkin telah ada sebelum mereka dipenjarakan (Soge & Rifani, 2021).

Selain itu, isu ini juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang sangat penting. Bangkok Rules, yang merupakan panduan internasional untuk perlindungan hak-hak narapidana perempuan, menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan dan hak asasi manusia mereka. Pemberian gizi tambahan yang memadai adalah salah satu komponen kunci dalam memastikan hak-hak ini terpenuhi. Oleh karena itu, ketidakcukupan pemberian gizi tambahan dapat dengan mudah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan norma internasional yang telah disepakati oleh banyak negara. Untuk itu, artikel ini akan mengulas tantangan dan kendala dalam pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan, serta melihat contoh-contoh program yang telah diterapkan di berbagai penjara di dunia untuk memastikan pemenuhan standar Bangkok Rules dalam hal pemberian gizi. Lebih dari sekadar masalah kesehatan, ini adalah isu yang mencerminkan komitmen suatu negara terhadap hak asasi manusia dan perlindungan yang lebih baik bagi narapidana perempuan. Pemahaman terhadap isu ini dapat membangun dasar yang lebih kuat untuk perubahan positif dalam sistem pasyarakatan dan memastikan bahwa narapidana perempuan menerima perlakuan yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan (Soge & Rifani, 2021).

Isu-isu hak asasi manusia dan kesejahteraan narapidana perempuan menjadi semakin penting dalam perbincangan masyarakat global. Meskipun narapidana, baik laki-laki maupun perempuan, berada dalam lingkungan penjara sebagai hukuman atas tindakan kriminal yang mereka lakukan, mereka tetap adalah warga negara yang memiliki hak asasi manusia yang sama

seperti masyarakat yang bebas. Fokus pada narapidana perempuan menjadi lebih mendalam ketika mempertimbangkan keadaan mereka di dalam penjara, terutama dalam hal pemberian gizi tambahan. Ini bukan hanya tentang memberikan makanan yang cukup, tetapi juga tentang memenuhi kewajiban sebagai masyarakat yang adil dan beradab dalam memperlakukan mereka. Dalam konteks ini, Bangkok Rules, panduan internasional yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penanganan narapidana perempuan, memiliki peran sentral. Artikel ini akan mengeksplorasi urgensi dan relevansi dari pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan yang dilihat melalui lensa Bangkok Rules, yang pada gilirannya, akan memunculkan pertanyaan kritis tentang hak asasi manusia, kesejahteraan, dan hak kembali bagi perempuan yang berada di balik jeruji besi.

Metode

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mendalam dalam memahami fenomena sosial dan perilaku manusia, dan dalam konteks artikel ini, metode ini digunakan untuk menjelaskan pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan dengan merujuk pada Bangkok Rules. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam melalui interpretasi dan analisis data yang lebih kontekstual dan mendalam daripada metode kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk studi pustaka. Di dalam artikel ini, penelitian kualitatif dapat dimulai dengan penelusuran literatur yang komprehensif mengenai Bangkok Rules, narapidana perempuan, dan aspek

gizi dalam penjara. Ini melibatkan pencarian jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Sebagai bagian dari studi pustaka ini, peneliti akan mengidentifikasi teori-teori dan kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis isu pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan dalam konteks hukum internasional. Setelah data dari studi pustaka diperoleh, peneliti akan melanjutkan dengan analisis kualitatif. Ini mencakup proses pemilahan, penyusunan, dan pengelompokan data yang relevan untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan isu-isu kunci yang muncul dari literatur. Dalam konteks artikel ini, analisis ini dapat memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana Bangkok Rules telah diimplementasikan dalam praktik pemberian gizi tambahan di berbagai penjara di seluruh dunia dan apa dampaknya pada narapidana perempuan. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif melibatkan interpretasi data. Peneliti akan mengembangkan pemahaman mendalam tentang isu-isu tersebut dan mencoba menjelaskan fenomena yang diamati dalam literatur. Dalam hal ini, peneliti akan dapat menggambarkan sejauh mana hak narapidana perempuan terpenuhi dalam hal pemberian gizi tambahan berdasarkan analisis data yang ditemukan dalam studi pustaka. Selain itu, penelitian kualitatif sering kali melibatkan triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan validitas temuan. Dalam konteks artikel ini, dapat berarti membandingkan data dari studi pustaka dengan temuan dari studi kasus, wawancara, atau observasi lapangan jika tersedia. Terakhir, metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan kontekstual, yang dapat digunakan untuk memahami masalah kompleks

seperti pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan dalam konteks Bangkok Rules. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam dan holistik tentang isu ini, yang dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memenuhi hak-hak narapidana perempuan dan meningkatkan sistem penjara sesuai dengan prinsip-prinsip Bangkok Rules.

Hasil

Definisi dan Tujuan Bangkok Rules

Bangkok Rules adalah sebutan yang diberikan untuk Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penahanan dan Penghukuman Narapidana Perempuan, yang disepakati oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Pada Tahun 2010 (*United Nations Rules (The Bangkok Rules)*, 2010). Pedoman ini menjadi rujukan internasional dalam hal perlakuan terhadap narapidana perempuan, yang mencakup berbagai aspek kehidupan di dalam penjara, termasuk pemberian gizi tambahan. Bangkok Rules bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana mengakui dan menghormati hak asasi manusia para narapidana perempuan, serta memberikan perlindungan khusus bagi mereka. Dengan demikian, Bangkok Rules tidak hanya menekankan aspek peradilan pidana, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki kondisi penahanan, termasuk asupan gizi yang memadai bagi narapidana perempuan. Pedoman ini mencakup panduan mengenai pemberian makanan, kesehatan, dan keamanan bagi narapidana perempuan, dengan fokus pada aspek-aspek khusus yang memperhatikan kebutuhan biologis dan gender mereka. Bangkok Rules menjelaskan bahwa narapidana

perempuan memiliki hak dasar untuk menerima asupan gizi yang memadai sesuai dengan kebutuhan biologis mereka. Ini mengakui pentingnya memahami perbedaan biologis antara narapidana perempuan dan laki-laki, serta bagaimana faktor-faktor seperti kehamilan dan laktasi memengaruhi kebutuhan gizi mereka. Pedoman ini menegaskan bahwa penjara dan pihak berwenang yang terkait harus memastikan bahwa narapidana perempuan menerima makanan yang seimbang dan memadai, yang mencakup nutrisi esensial seperti protein, vitamin, mineral, dan serat. Selain itu, Bangkok Rules juga menekankan perlunya mempertimbangkan preferensi kuliner dan budaya narapidana perempuan dalam menyusun rencana makanan. Ini berarti makanan yang disajikan harus mencerminkan keanekaragaman budaya dan agama, dan memberikan pilihan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Pedoman ini juga menegaskan bahwa makanan harus aman dan bersih, serta diolah sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah penyakit yang dapat timbul akibat konsumsi makanan yang tidak layak. Bangkok Rules, pada intinya, menggarisbawahi pentingnya memperlakukan narapidana perempuan dengan hormat, menghormati hak-hak asasi mereka, dan memastikan bahwa mereka menerima asupan gizi yang memadai. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mewajibkan perlakuan yang manusiawi, termasuk dalam hal makanan dan gizi. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi dasar hukum internasional, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga martabat dan kesejahteraan narapidana perempuan, serta dalam usaha memperbaiki sistem

peradilan pidana secara keseluruhan (Novianti *et al.*, 2020).

Bangkok Rules, juga dikenal sebagai "United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders," adalah sebuah pedoman yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan perlakuan yang adil dan layak terhadap narapidana perempuan (*United Nations Rules (The Bangkok Rules)*, 2010). Tujuan utama Bangkok Rules adalah untuk menjaga dan memajukan hak asasi manusia narapidana perempuan, termasuk hak mereka untuk menerima perlakuan yang layak dalam hal pemberian gizi tambahan. Pedoman ini telah mengilhami upaya internasional untuk meningkatkan kondisi narapidana perempuan di seluruh dunia dan membantu merumuskan standar yang lebih baik untuk memberikan gizi tambahan kepada mereka. Salah satu tujuan utama dari Bangkok Rules adalah mengurangi ketidaksetaraan gender yang sering terjadi dalam sistem penjara. Ini mencakup memastikan bahwa narapidana perempuan mendapatkan perawatan dan perhatian medis yang sesuai, termasuk pemberian gizi tambahan ketika diperlukan. Pemberian gizi yang memadai kepada narapidana perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia mereka, dan ini tercermin dalam tujuan Bangkok Rules untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di dalam sistem peradilan pidana. Bangkok Rules juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan narapidana perempuan untuk menjalani hukuman mereka dengan martabat. Ini berarti memastikan bahwa kondisi penjara memadai dan bahwa asupan gizi yang cukup dan seimbang disediakan. Tujuannya adalah untuk

mencegah penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi serta untuk mempromosikan pemulihan dan resosialisasi narapidana perempuan. Selain itu, Bangkok Rules bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif penahanan terhadap keluarga narapidana perempuan, termasuk anak-anak mereka. Dengan memberikan gizi tambahan yang memadai kepada narapidana perempuan, ini dapat membantu memastikan bahwa mereka tetap sehat dan dapat berperan sebagai ibu yang peduli ketika mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Ini juga mencerminkan komitmen untuk melindungi hak anak dan keluarga narapidana perempuan. Dengan demikian, tujuan Bangkok Rules adalah untuk mempromosikan perlakuan yang adil, layak, dan setara bagi narapidana perempuan. Ini termasuk hak mereka untuk menerima gizi tambahan yang memadai selama penahanan mereka. Pedoman ini merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang mempertimbangkan kebutuhan khusus narapidana perempuan, termasuk asupan gizi yang sehat dan seimbang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak terhindarkan bagi mereka (Rinaldi, 2023).

Pemenuhan Gizi Narapidana Perempuan Sesuai Bangkok Rules

Pemenuhan gizi narapidana perempuan sesuai dengan Bangkok Rules adalah suatu aspek yang memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks hukuman dan peradilan pidana yang adil. Bangkok Rules, yang merupakan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tindakan untuk Perempuan Narapidana dan Tahanan Perempuan, memegang peran penting dalam menjaga hak asasi manusia dan kesejahteraan narapidana perempuan. Pemenuhan gizi yang

memadai bagi narapidana perempuan adalah sebuah prasyarat untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang layak serta peluang nyata untuk pemulihan dan reintegrasi sosial yang berhasil. Dalam konteks ini, pemenuhan gizi narapidana perempuan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang yang krusial. Pentingnya pemenuhan gizi narapidana perempuan mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan semua warganya, termasuk mereka yang berada di balik jeruji penjara. Dalam hal ini, Bangkok Rules menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk asupan gizi, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Dalam penjara, narapidana perempuan tidak hanya harus diberikan makanan yang cukup, tetapi juga makanan yang bergizi sehingga mereka dapat menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menjembatani kesenjangan kesehatan antara narapidana perempuan dan masyarakat umum, yang seringkali menderita masalah kesehatan yang lebih serius. Pemenuhan gizi bagi narapidana perempuan juga berhubungan dengan tujuan rehabilitasi dan resosialisasi yang lebih luas. Jika mereka dibiarkan menderita kekurangan gizi, maka proses rehabilitasi dan resosialisasi mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Kekurangan gizi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti defisiensi vitamin dan mineral, yang dapat mengganggu kemampuan narapidana perempuan untuk mengikuti program-program rehabilitasi atau pelatihan. Selain itu, kondisi kesehatan yang buruk dapat mengarah pada masalah mental, yang akan memperburuk prospek mereka untuk kembali ke masyarakat dengan sukses. Pemenuhan gizi narapidana

perempuan juga memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat kekerasan dan konflik di dalam penjara. Ketika narapidana perempuan merasa diperlakukan dengan adil dan layak, mereka cenderung lebih kooperatif dan kurang cenderung terlibat dalam insiden kekerasan. Hal ini mendukung lingkungan penjara yang lebih aman, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi semua narapidana dan petugas penjara (Ramadhani, 2020).

Pemenuhan gizi narapidana perempuan sesuai dengan Bangkok Rules adalah aspek penting dalam menjalankan sistem penjara yang berlandaskan pada hak asasi manusia. Bangkok Rules, atau aturan Bangkok tentang perawatan narapidana perempuan, memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi masalah pemberian gizi tambahan dalam konteks penjara. Faktanya, ketidakcukupan gizi dalam penjara dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental narapidana perempuan, serta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana pemenuhan gizi narapidana perempuan sesuai dengan Bangkok Rules dapat mengubah paradigma sistem penjara, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan memberikan peluang yang lebih baik untuk resosialisasi. Penting untuk memahami bahwa Bangkok Rules menegaskan bahwa narapidana perempuan harus diberikan asupan gizi yang memadai. Ini mencakup berbagai komponen makanan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka, seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, dan vitamin. Selain itu, gizi harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus narapidana, seperti wanita hamil atau menyusui. Pemberian gizi yang memadai bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus

dijamin oleh pihak berwenang penjara. Ketika gizi diberikan sesuai dengan Bangkok Rules, dampak positifnya sangat signifikan. Kesehatan fisik narapidana perempuan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya perawatan medis di dalam penjara. Ini juga membantu menciptakan lingkungan penjara yang lebih aman dan sehat. Namun, lebih dari itu, pemenuhan gizi yang tepat juga memengaruhi kesehatan mental narapidana. Ketika seseorang merasa sehat dan mendapatkan asupan makanan yang memadai, hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres dan depresi, memungkinkan narapidana perempuan untuk lebih fokus pada rehabilitasi mereka. Penting untuk mengingat bahwa salah satu tujuan dari sistem penjara adalah resosialisasi narapidana. Dengan pemenuhan gizi yang sesuai, narapidana perempuan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkan program rehabilitasi yang tersedia. Mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pelatihan keterampilan, pendidikan, dan program pemulihan. Dalam jangka panjang, ini dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi dalam upaya memenuhi gizi narapidana perempuan sesuai dengan Bangkok Rules. Terbatasnya anggaran penjara, infrastruktur yang usang, dan kendala hukum dapat menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pihak berwenang penjara, organisasi hak asasi manusia, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa aturan Bangkok diimplementasikan dengan benar. Dalam kesimpulan, pemenuhan gizi narapidana perempuan sesuai dengan Bangkok Rules bukan hanya tentang memberikan

makanan, melainkan tentang menghormati hak asasi manusia mereka, meningkatkan kualitas hidup di dalam penjara, dan memberikan peluang resosialisasi yang lebih baik. Implementasi yang tepat dari aturan Bangkok tidak hanya membawa manfaat bagi narapidana perempuan, tetapi juga memajukan sistem penjara yang lebih manusiawi dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan (Biaggy & Wibowo, 2020).

Dampak Positif pada Resosialisasi

Resosialisasi adalah langkah penting dalam pemulihan narapidana, di mana mereka diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Pemberian gizi tambahan yang memadai dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan proses resosialisasi ini. Pemberian gizi tambahan yang memadai akan berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental narapidana perempuan. Dalam konteks penjara, narapidana sering kali berisiko mengalami defisiensi gizi karena batasan dalam makanan yang mereka terima. Dengan menyediakan asupan gizi yang cukup, mereka dapat mengalami peningkatan kesehatan fisik, yang pada gilirannya akan membantu mereka menjalani aktivitas sehari-hari di penjara dengan lebih baik. Kesehatan mental juga terkait erat dengan gizi, dengan defisiensi gizi yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental yang mungkin telah ada sebelumnya. Pemberian gizi tambahan dapat membantu mengurangi risiko masalah kesehatan mental ini dan memungkinkan narapidana perempuan untuk lebih fokus pada upaya resosialisasi mereka. Selain dampak langsung pada kesehatan, pemberian gizi tambahan juga dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana

perempuan di dalam penjara. Dengan asupan gizi yang memadai, mereka akan memiliki energi yang cukup untuk berpartisipasi dalam program-program pelatihan, pendidikan, dan rehabilitasi yang ditawarkan dalam penjara. Ini akan membantu narapidana perempuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam reintegrasi ke masyarakat setelah mereka dibebaskan. Dampak positif pemberian gizi tambahan pada resosialisasi juga dapat dilihat dalam pengurangan tingkat kriminalitas berulang. Ketika narapidana perempuan memiliki akses terbatas pada gizi, mereka mungkin cenderung kembali ke kejahatan setelah dibebaskan karena kurangnya peluang yang mereka miliki. Namun, dengan pemberian gizi tambahan yang memadai dan akses yang lebih baik ke program rehabilitasi, mereka dapat mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang jauh lebih baik dan integrasi yang lebih sukses ke dalam masyarakat. Pemberian gizi tambahan yang memadai juga dapat berperan dalam mendorong narapidana perempuan untuk lebih aktif dan berkomitmen terhadap program resosialisasi. Saat mereka merasa bahwa hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk makanan yang bergizi, diakui dan dihormati, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mengikuti program-program yang ditawarkan dan merasa lebih positif tentang proses resosialisasi mereka. Dengan demikian, pemberian gizi tambahan yang memadai kepada narapidana perempuan, sesuai dengan Bangkok Rules, tidak hanya berdampak positif pada kesehatan mereka tetapi juga membantu meningkatkan proses resosialisasi. Ini adalah langkah penting dalam mendukung reintegrasi narapidana perempuan ke dalam masyarakat dan dalam mempromosikan pemulihan dan

perbaikan dalam sistem peradilan pidana (Naryadi *et al.*, 2019).

Pembahasan

Implementasi pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Bangkok Rules, merupakan aspek krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan rehabilitasi narapidana perempuan di penjara. Di lapangan, implementasi program pemberian gizi tambahan ini melibatkan berbagai pihak dan melibatkan serangkaian langkah yang harus diambil untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses resosialisasi narapidana perempuan. Dalam implementasi ini, peran institusi penjara sangat penting. Penjara harus memiliki sistem pencatatan yang akurat dan terstandar untuk memantau asupan gizi dari narapidana perempuan (Nelwitis *et al.*, 2023). Hal ini termasuk dalam perencanaan menu harian yang mencakup berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Institusi penjara harus memiliki staf yang terlatih untuk memasak dan memberikan makanan yang berkualitas tinggi, menghindari makanan yang mengandung bahan berbahaya, serta memperhatikan preferensi diet atau batasan kesehatan khusus yang mungkin dimiliki oleh narapidana perempuan. Selanjutnya, aspek penting dari implementasi ini adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada narapidana perempuan. Mereka perlu diberikan pengetahuan tentang nutrisi yang baik, pentingnya diet seimbang, dan cara memilih makanan yang sesuai untuk kesehatan mereka. Ini adalah langkah proaktif yang membantu narapidana perempuan memahami manfaat dari asupan gizi yang baik dan

bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan mereka, serta membantu mereka mengambil peran aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap Bangkok Rules. Selain itu, implementasi pemberian gizi tambahan juga melibatkan kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah (LSM) dan lembaga kesehatan. LSM dapat memberikan sumber daya tambahan dan bantuan keuangan untuk mendukung program gizi tambahan ini. Sementara itu, lembaga kesehatan dapat memberikan pemantauan medis reguler dan penilaian kesehatan bagi narapidana perempuan, memastikan bahwa pemberian gizi tambahan disesuaikan dengan kondisi kesehatan individu. Selama proses implementasi, evaluasi berkala sangat penting. Institusi penjara harus terus memantau efektivitas program pemberian gizi tambahan ini. Evaluasi ini harus mencakup aspek kualitas makanan, pemenuhan gizi yang memadai, dan dampaknya pada kesehatan fisik dan mental narapidana perempuan. Data ini sangat berguna untuk membuat perubahan yang diperlukan dan terus memperbaiki program (Kurniawan, 2019).

Untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana perempuan dihormati, terutama hak mereka untuk menerima asupan gizi yang memadai selama masa hukuman, perlu adanya kerjasama erat antara berbagai pemangku kepentingan dalam sistem penjara. Implementasi di lapangan dimulai dengan penilaian kebutuhan gizi individu yang dilakukan oleh profesional kesehatan berlisensi. Penilaian ini harus memperhitungkan faktor-faktor seperti usia, kondisi kesehatan, dan kebutuhan gizi khusus seperti ibu hamil atau menyusui. Hasil dari penilaian ini menjadi dasar untuk merancang rencana gizi yang sesuai. Selanjutnya, pemberian gizi tambahan

harus melibatkan kerjasama antara berbagai departemen di dalam penjara, termasuk departemen kesehatan, departemen keamanan, dan pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan di penjara. Koordinasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan dalam Bangkok Rules. Ini termasuk memastikan bahwa menu penjara mencakup beragam makanan yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan narapidana perempuan. Penting juga untuk mencatat bahwa pemberian gizi tambahan harus memenuhi standar medis dan etika yang ketat. Ini berarti bahwa hanya profesional kesehatan yang berkompeten yang boleh memberikan gizi tambahan, dan pemberiannya harus didasarkan pada rekomendasi medis yang jelas. Selain itu, narapidana perempuan harus diberikan informasi yang cukup mengenai makanan yang mereka konsumsi, termasuk komposisi gizinya, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai makanan mereka (Kurniawan, 2019).

Namun, implementasi lapangan juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Penyediaan makanan berkualitas tinggi dan gizi tambahan memerlukan sumber daya finansial yang cukup, dan penjara sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal ini. Selain itu, infrastruktur yang memadai untuk mempersiapkan, menyajikan, dan menyimpan makanan yang sesuai juga diperlukan, dan tidak semua penjara memiliki fasilitas yang memadai. Dalam hal ini, panduan Bangkok Rules dapat berperan sebagai landasan hukum dan etika yang kuat dengan memberikan pedoman yang jelas tentang hak narapidana perempuan, termasuk hak

mereka untuk menerima asupan gizi yang memadai. Panduan ini juga menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana perempuan dan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi. Dengan demikian, panduan Bangkok Rules bukan hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga menjadi alat untuk mengukur apakah implementasi di lapangan telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Dalam keseluruhan konteks ini, implementasi lapangan dari pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan, sesuai dengan Bangkok Rules, adalah langkah yang penting dalam memastikan hak-hak mereka dihormati. Ini memerlukan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, penerapan standar medis dan etika yang tinggi, serta upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dengan demikian, implementasi ini adalah langkah yang mendukung pemulihan narapidana perempuan dan kontribusi positif terhadap tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana (Devina & Sulistyani, 2019).

Kesimpulan

Pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan, seperti yang diatur dalam Peraturan Bangkok Rules, merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi manusia para narapidana perempuan. Bangkok Rules, yang dirancang oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Kejahatan dan Pemberian Perlindungan kepada narapidana, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk meningkatkan standar perawatan narapidana perempuan di seluruh dunia. Salah satu poin penting dari peraturan ini adalah memberikan perhatian yang cukup

pada aspek kesehatan, termasuk pemberian gizi yang memadai. Kesimpulan ini muncul dari pemahaman akan beberapa aspek penting yang telah dibahas dalam artikel ini. Penting untuk diingat bahwa narapidana perempuan adalah individu yang telah kehilangan kebebasan mereka, tetapi bukan martabat atau hak-hak asasi mereka. Dalam konteks ini, pemberian gizi tambahan bukanlah suatu bentuk kemewahan, melainkan kewajiban yang dipegang oleh pihak berwenang penjara dan pemerintah. Bangkok Rules dengan jelas menegaskan bahwa narapidana, terlepas dari status mereka, berhak untuk menerima pelayanan kesehatan yang mencakup asupan gizi yang cukup. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan pemeliharaan martabat manusia. Selanjutnya, pemberian gizi yang memadai memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental narapidana perempuan. Kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius, seperti kekurangan gizi, masalah pencernaan, dan penurunan berat badan. Dampaknya bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada kemampuan narapidana untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan resosialisasi. Dalam konteks hukuman, pemberian gizi yang memadai bukan hanya tanggung jawab kemanusiaan, tetapi juga praktik yang mendukung pemulihan dan pengurangan risiko kejahatan berulang. Pemberian gizi tambahan sesuai dengan Bangkok Rules juga dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia. Kekurangan gizi yang parah dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Dengan mematuhi peraturan ini, pihak berwenang penjara dapat mengurangi potensi klaim pelanggaran hak asasi manusia dan membangun

sistem penjara yang lebih adil dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional. Pemberian gizi tambahan yang memadai kepada narapidana perempuan juga mencerminkan komitmen pada reintegrasi sosial yang sukses. Ketika narapidana memiliki kesehatan yang baik, mereka lebih siap untuk kembali ke masyarakat dan membangun kembali hidup mereka. Ini berpotensi mengurangi tingkat kejahatan berulang dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan sesuai dengan Peraturan Bangkok Rules tidak dapat diabaikan. Ini bukan hanya tentang menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang menjunjung tinggi hak asasi manusia, mendorong pemulihan, dan mempromosikan keadilan dalam sistem penjara. Mematuhi peraturan ini adalah langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih adil dan kemanusiaan yang lebih baik bagi narapidana perempuan di seluruh dunia.

Implikasi

Pemberian gizi tambahan narapidana perempuan ditinjau dari Bangkok Rules adalah topik yang memiliki implikasi penting dalam ranah penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan narapidana perempuan. Pemberian gizi tambahan kepada narapidana perempuan dapat dianggap sebagai upaya untuk memenuhi hak asasi manusia mereka. Bangkok Rules, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan pedoman penting dalam menghormati dan melindungi hak-hak narapidana perempuan. Dalam konteks ini, memberikan asupan gizi yang memadai menjadi hak yang harus dijamin. Selanjutnya, implikasi dari pemenuhan

gizi tambahan ini terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan narapidana perempuan. Kekurangan gizi dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka. Dalam penjara, kondisi gizi yang buruk dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh, risiko penyakit, dan masalah kesehatan kronis. Ini bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada beban sistem perawatan kesehatan penjara. Penting untuk memahami bahwa pemberian gizi tambahan memiliki implikasi positif dalam konteks resosialisasi. Ketika narapidana perempuan menerima asupan gizi yang cukup, mereka cenderung memiliki energi dan kesehatan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam program-program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan kerja. Hal ini dapat membantu dalam persiapan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan mereka.

Namun, terdapat implikasi lain yang perlu diperhatikan, seperti tantangan praktis dalam menyediakan gizi tambahan di lingkungan penjara. Ini melibatkan anggaran yang cukup, perencanaan menu yang memadai, serta sumber daya manusia yang terlatih untuk menyediakan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan. Dengan begitu, pemberian gizi tambahan sesuai dengan Bangkok Rules juga menimbulkan pertanyaan seputar sumber daya dan komitmen institusi penjara dan pihak berwenang. Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat implikasi lebih besar pada pemahaman kita tentang bagaimana narapidana perempuan diperlakukan di sistem penjara. Pemberian gizi tambahan adalah satu aspek dari penghormatan hak-hak mereka, dan penilaian kita

tentang keadilan dan martabat manusia diuji melalui implementasi praktisnya. Pemberian gizi tambahan narapidana perempuan yang sesuai dengan Bangkok Rules bukanlah sekadar permasalahan makanan, melainkan merupakan cerminan dari sejauh mana kita memahami dan menghormati hak asasi manusia mereka. Implikasi dari topik ini berdampak pada kesejahteraan narapidana perempuan, sistem peradilan pidana, dan moralitas masyarakat dalam memperlakukan mereka dengan layak dan manusiawi.

Referensi

- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 137-148. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *WIDYA YURIDIKA: Jurnal Hukum*, 3(2). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.
- Devina, T., & Sulistyani, N. (2019). Nilai Karakter Nasionalisme pada Siswa Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) Thailand. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3, 97–112.
- Kurniawan, R. (2019). *Program Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Seumur Hidup*.
- Meileni, N., Pemasyarakatan, P. I., Politeknik, P. W., & Pemasyarakatan, I. (2023). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. *JK: Jurnal Kesehatan*, 1, 562–571.
- Naryadi, Adwani, & Ali, D. (2019). Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh T. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 157–168.
- Novianti, V., Ernaningsih, W., & Flambonita, S. (2020). Efforts to Fulfill the Right of Rehabilitation For Female Defendant (Study at Lapas IIA Women's Prison in Palembang).
- Ramadhani, D. R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi Narapidana. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1).
- Rinaldi, K. (2023). Efforts of Class IIA Pekanbaru Women's Penitentiary in Fulfilling the Rights of Inmates to Interact with Family in The Covid-19 Pandemic. *Mimbar Keadilan*, 16(2).
- Soge, M. M., & Rifani, D. N. (2021). *Implementation of National Instrument and Bangkok Rules During the Pandemic Period Through Hydroponics Skills Training by Bandung Women's Penitentiary. United Nations Rules (The Bangkok Rules)*. (2010).